

Cite this: *J.SST*, Vol 4 (1):  
116-130, 2024

Received Date:  
30 September 2024  
Accepted Date:  
14 Oktober 2024

**Keywords:**  
DBH, DAU, Economic Independence,  
Economic Growth

**Kata kunci:**  
DBH, DAU, Kemandirian  
Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi

**DOI:**  
<http://dx.doi.org/10.31960/tea.v5i1>  
(contoh)

## Analisis Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Dalam Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Penajam Paser Utara

*Analysis of Profit Sharing Funds and General Allocation Funds in Regional Financial Independence and Economic Growth in North Penajam Paser Regency*

Arif Afandi<sup>1\*</sup>; St. Rukaiyah<sup>2</sup>; Nurmadhani Fitri Suyuthi<sup>3</sup>  
Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar,  
90231, Indonesia

\*Email: [pemudakabji@gmail.com](mailto:pemudakabji@gmail.com); [rukaiyah\\_st260](mailto:rukaiyah_st260); [nurmadhanifitri29@gmail.com](mailto:nurmadhanifitri29@gmail.com); (Email institusi, [pascasarjana@unifa.ac.id](mailto:pascasarjana@unifa.ac.id))

**Abstract.** *This research aims to determine and analyze Profit Sharing Funds (DBH) in North Penajam Paser Regency, General Allocation Funds (DAU) in North Penajam Paser Regency, Regional Financial Independence in North Penajam Paser Regency, and Economic Growth in North Penajam Paser Regency. The research method used is quantitative descriptive research. By analyzing DBH, DAU, Financial Independence and economic growth with Trend analysis. The data used is secondary data for 10 years. The research results show that DBH, DAU, Financial Independence and economic growth of North Penajam Paser Regency show fluctuations but also periods of significant increase. This is important to consider in economic development planning and policy in North Penajam Paser Regency.*

**Keywords:** *DBH, DAU, Economic Independence, Economic Growth*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif Kuantitatif. Dengan menganalisis DBH, DAU, Kemandirian Keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan analisis Trend. Data yang digunakan adalah Data sekunder selama 10 tahun. Hasil penelitian menunjukkan DBH, DAU, Kemandirian Keuangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan adanya fluktuasi tetapi juga adanya periode peningkatan yang signifikan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

**Kata kunci:** DBH, DAU, Kemandirian Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi

## PENDAHULUAN

Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya untuk mencapai kemandirian finansial dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat alokasi dana perimbangan yang semakin menurun. Meskipun upaya peningkatan PAD telah dilakukan, namun masih belum cukup untuk membiayai pembangunan yang diperlukan. Saat ini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap peningkatan PAD. Untuk mencapai kemandirian finansial yang diinginkan, Penajam Paser Utara perlu melakukan transformasi secara bertahap dalam memperluas sumber PAD dengan meningkatkan kinerja BUMD dan mengembangkan nilai tambah dari sektor ekonomi non-migas dan batu bara, seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan.

Kinerja finansial daerah dapat dinilai dengan menggunakan Derajat Kemandirian Fiskal Daerah (DKFD) atau Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam tahun yang sama, tanpa memperhitungkan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan standar penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk dalam kategori rendah karena kurang dari 50 persen.

**Tabel 1.** Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023

| Tahun        | PAD (Rupiah)              | Total Pendapatan (Rupiah)   | DOF (Persen) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2018         | 72.613.451.397,48         | 1.231.736.324.081,42        | 5,90%        |
| 2019         | 97.277.863.728,84         | 1.595.183.279.914,84        | 6,10%        |
| 2020         | 101.309.011.509,00        | 1.536.714.697.248,00        | 6,59%        |
| 2021         | 87.892.163.416,35         | 1.222.723.310.615,79        | 7,19%        |
| 2022         | 125.386.713.912,32        | 1.757.844.430.423,32        | 7,13%        |
| 2023         | 113.923.955.838,25        | 2.141.799.142.392,94        | 5,32%        |
| <b>Total</b> | <b>598.403.159.802,24</b> | <b>9.486.001.184.676,31</b> | <b>6,31%</b> |

Sumber : BAPPELITBANG PPU, 2023

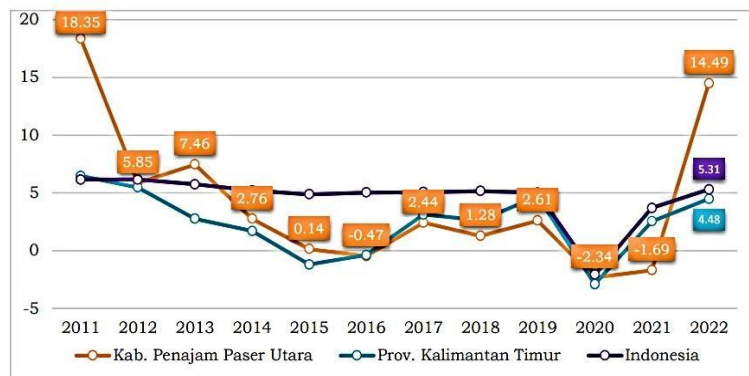
Rata-rata tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebesar 7.27%. Pada tahun 2017, tingkat kemandirian keuangan mencapai puncaknya dengan angka 10.44%, sementara pada tahun 2018, mencapai titik terendah dengan 5.90%. Data ini mengindikasikan bahwa kemampuan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membiayai pembangunan daerah dalam lima tahun terakhir masih tergolong rendah, dan masih sangat bergantung pada danaperimbangan pusat, dimana dana perimbangan pusat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Penting untuk diperhatikan bahwa besaran dana perimbangan pusat sangat dipengaruhi oleh kontribusi pajak/non pajak (termasuk Migas) yang berasal dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara itu sendiri. Sehingga diperlukan alokasi dana lainnya, salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks kemandirian keuangan daerah juga mencerminkan seberapa aktifnya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi secara teratur. Pajak merupakan pilar utama pendapatan daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berhubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan mereka. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Sebaliknya, penundaan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak mencerminkan rendahnya tingkat kesejahteraan mereka yang mungkin merasa kesulitan untuk membayar pajak. Namun, hal ini tidak selalu berlaku secara umum, karena penundaan pembayaran pajak juga

bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kurangnya sosialisasi, kesulitan dalam sistem pembayaran pajak, dan sebagainya.

Meskipun mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara terus berlanjut secara positif. Pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 4,26% per tahun, mendorong PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 7,43 triliun rupiah pada tahun 2022 dengan harga konstan. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara rata-rata lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur yang hanya tumbuh 2,45% per tahun selama periode 2011-2022. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,62% per tahun selama periode yang sama.

**Gambar 1** Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2011-2022



Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2011-2022, dengan kecenderungan penurunan secara keseluruhan. Puncak pertumbuhan terjadi pada tahun 2011, mencapai 18,35 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh performa positif di berbagai sektor ekonomi, terutama pertambangan dan penggalian yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 41,85 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 11,25 persen, menjadi sumber utama pertumbuhan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pertumbuhan ekonomi daerah melambat karena kinerja kedua sektor yang dominan dalam kegiatan ekonomi di wilayah Penajam Paser Utara juga melambat. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan kinerja hingga 14,93 persen pada tahun 2021, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami perlambatan, bahkan kontraksi sebesar 0,13 persen pada tahun 2022.

Setelah pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pemulihan yang signifikan. Pertumbuhan sektor konstruksi meningkat pesat, mencapai 25,20 persen pada tahun 2021 dan melonjak lebih tinggi menjadi 89,82 persen pada tahun 2022. Kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 84,39 persen. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa sektor konstruksi akan terus berkembang sejalan dengan pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di IKN.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan

di Kabupaten Penajam Paser Utara pada bulan Oktober-Desember 2023. Dalam studi ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah cara untuk menyajikan dan menjelaskan data numerik dengan ringkas sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Langkah-langkah yang disusun oleh penulis dalam metode analisis data ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk studi ini dilakukan di kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Menghitung data dengan menggunakan Analisis Keuangan Daerah dengan Analisis Trend, Evaluasi hasil laporan data keuangan daerah dan Analisis Deskriptif (DBH, DAU, Kemandirian Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi).
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan Daerah (DBH, DAU, Kemandirian Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Melakukan pembahasan berdasarkan data yang telah di analisis.
5. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan yang menggunakan rasio efektivitas dan rasio kemandirian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Realisasi Keuangan Daerah dengan Analisis Trend

Analisis tren adalah salah satu teknik yang dipakai untuk mengevaluasi perkembangan suatu perusahaan dengan menganalisis data keuangan dari beberapa periode yang diungkapkan dalam bentuk persentase. Dengan menggunakan analisis tren, pemerintah dapat memahami apakah kondisi keuangan daerah menunjukkan kecenderungan kenaikan, stabil, atau penurunan. Untuk memeriksa situasi keuangan selama periode Tahun 2013-2022, kita dapat menggunakan rumus berikut:

#### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Perhitungan analisis tren Dana Bagi Hasil (DBH) selama periode Tahun 2013-2022, yaitu sebesar:

1. DBH 2014:  

$$\text{Tren 2014} = \frac{872.534.744.365,00}{870.544.568.872,00} \times 100\% \approx 100.23\%$$
2. DBH 2015:  

$$\text{Tren 2015} = \frac{770.198.320.794,00}{872.534.744.365,00} \times 100\% \approx 88.28\%$$
3. DBH 2016:  

$$\text{Tren 2016} = \frac{621.009.595.540,00}{770.198.320.794,00} \times 100\% \approx 80.57\%$$
4. DBH 2017:  

$$\text{Tren 2017} = \frac{364.483.687.872,00}{621.009.595.540,00} \times 100\% \approx 58.65\%$$
5. DBH 2018:  

$$\text{Tren 2018} = \frac{569.159.832.744,00}{364.483.687.872,00} \times 100\% \approx 156.14\%$$
6. DBH 2019:  

$$\text{Tren 2019} = \frac{865.335.922.349,00}{569.159.832.744,00} \times 100\% \approx 152.14\%$$
7. DBH 2020:  

$$\text{Tren 2020} = \frac{570.118.399.732,00}{865.335.922.349,00} \times 100\% \approx 65.86\%$$
8. DBH 2021:  

$$\text{Tren 2021} = \frac{435.298.726.306,00}{570.118.399.732,00} \times 100\% \approx 76.41\%$$
9. DBH 2022:  

$$\text{Tren 2022} = \frac{1.423.537.159.378,00}{435.298.726.306,00} \times 100\% \approx 326.92\%$$

Dari analisis tersebut, dapat dilihat tren pertumbuhan DBH Kabupaten Penajam Paser Utara:

- a. Trennya stabil pada tahun 2014.
- b. Kemudian mengalami penurunan signifikan dari tahun 2015 hingga 2017.
- c. Mulai tahun 2018, terjadi pertumbuhan yang signifikan, khususnya pada tahun

2019 dan 2022.

- d. Namun, terdapat fluktuasi yang signifikan pada tahun-tahun tertentu, seperti terlihat pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami penurunan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis tren pertumbuhan DBH menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan tetapi juga perbaikan yang cukup besar pada tahun-tahun tertentu. Namun penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi ini dalam perencanaan keuangan dan kebijakan di masa depan.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Perhitungan analisis tren Dana Alokasi Umum (DAU) selama periode Tahun 2013-2022, yaitu sebesar:

1. DAU 2014:  

$$\text{Tren 2014} = \frac{188.713.598.000,00}{194.579.185.000,00} \times 100\% \approx 97.00\%$$
2. DAU 2015:  

$$\text{Tren 2015} = \frac{138.285.466.000,00}{188.713.598.000,00} \times 100\% \approx 73.22\%$$
3. DAU 2016:  

$$\text{Tren 2016} = \frac{254.752.550.000,00}{138.285.466.000,00} \times 100\% \approx 184.16\%$$
4. DAU 2017:  

$$\text{Tren 2017} = \frac{255.066.428.000,00}{254.752.550.000,00} \times 100\% \approx 100.12\%$$
5. DAU 2018:  

$$\text{Tren 2018} = \frac{259.192.257.000,00}{255.066.428.000,00} \times 100\% \approx 101.61\%$$
6. DAU 2019:  

$$\text{Tren 2019} = \frac{283.885.908.000,00}{259.192.257.000,00} \times 100\% \approx 109.53\%$$
7. DAU 2020:  

$$\text{Tren 2020} = \frac{275.868.751.000,00}{283.885.908.000,00} \times 100\% \approx 97.17\%$$
8. DAU 2021:  

$$\text{Tren 2021} = \frac{271.407.999.000,00}{275.868.751.000,00} \times 100\% \approx 98.38\%$$
9. DAU 2022:  

$$\text{Tren 2022} = \frac{272.437.796.000,00}{271.407.999.000,00} \times 100\% \approx 99.62\%$$

Dari analisis tersebut, kita dapat melihat pola tren dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Penajam Paser Utara:

- a. Terjadi penurunan signifikan pada tahun 2014 dan 2015.
- b. Kemudian terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016.
- c. Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat fluktuasi tetapi cenderung stabil dengan pertumbuhan yang relatif kecil atau menurun sedikit.

Dengan demikian, analisis tren DAU menunjukkan adanya fluktuasi tetapi juga adanya periode peningkatan yang signifikan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan dan kebijakan untuk memastikan kesehatan keuangan daerah dan efektivitas alokasi sumber daya.

## 3. Kemandirian Keuangan Daerah

Perhitungan analisis tren Kemandirian Keuangan Daerah selama periode Tahun 2013-2022, yaitu sebesar:

1. Kemandirian Keuangan 2014:  
Tren 2014 =  $\frac{2.927.826.891,35}{3.104.788.785,95} \times 100\% \approx 94.31\%$
2. Kemandirian Keuangan 2015:  
Tren 2015 =  $\frac{2.854.377.002,28}{2.927.826.891,35} \times 100\% \approx 97.49\%$
3. Kemandirian Keuangan 2016:  
Tren 2016 =  $\frac{7.708.979.248,60}{2.854.377.002,28} \times 100\% \approx 269.95\%$
4. Kemandirian Keuangan 2017:  
Tren 2017 =  $\frac{7.005.271.711,50}{7.708.979.248,60} \times 100\% \approx 90.90\%$
5. Kemandirian Keuangan 2018:  
Tren 2018 =  $\frac{4.907.846.756,75}{7.005.271.711,50} \times 100\% \approx 70.03\%$
6. Kemandirian Keuangan 2019:  
Tren 2019 =  $\frac{9.150.885.925,25}{4.907.846.756,75} \times 100\% \approx 186.37\%$
7. Kemandirian Keuangan 2020:  
Tren 2020 =  $\frac{10.617.471.344,25}{9.150.885.925,25} \times 100\% \approx 116.00\%$
8. Kemandirian Keuangan 2021:  
Tren 2021 =  $\frac{6.726.318.073,00}{10.617.471.344,25} \times 100\% \approx 63.43\%$
9. Kemandirian Keuangan 2022:  
Tren 2022 =  $\frac{8.306.854.374,00}{6.726.318.073,00} \times 100\% \approx 123.62\%$

Dari analisis tersebut, kita dapat melihat pola tren dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara:

- a. Terjadi fluktuasi yang signifikan pada beberapa tahun, terutama pada tahun 2016, 2018, dan 2021.
- b. Tren pertumbuhan positif kembali terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2022 setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam kemandirian keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan. Analisis tren ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi lebih lanjut dan perencanaan keuangan yang lebih baik di masa depan.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Perhitungan analisis tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode Tahun 2013-2022, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi 2014:  
Tren 2014 =  $\frac{57.919.614.222,27}{51.204.182.224,70} \times 100\% \approx 113.18\%$
2. Pertumbuhan Ekonomi 2015:  
Tren 2015 =  $\frac{65.567.382.369,11}{57.919.614.222,27} \times 100\% \approx 113.23\%$
3. Pertumbuhan Ekonomi 2016:  
Tren 2016 =  $\frac{224.652.811.860,67}{65.567.382.369,11} \times 100\% \approx 342.80\%$
4. Pertumbuhan Ekonomi 2017:  
Tren 2017 =  $\frac{103.574.866.662,84}{224.652.811.860,67} \times 100\% \approx 46.09\%$
5. Pertumbuhan Ekonomi 2018:  
Tren 2018 =  $\frac{70.390.460.397,48}{103.574.866.662,84} \times 100\% \approx 68.00\%$
6. Pertumbuhan Ekonomi 2019:  
Tren 2019 =  $\frac{93.491.428.426,19}{70.390.460.397,48} \times 100\% \approx 132.17\%$
7. Pertumbuhan Ekonomi 2020:  
Tren 2020 =  $\frac{88.135.007.244,26}{93.491.428.426,19} \times 100\% \approx 94.28\%$
8. Pertumbuhan Ekonomi 2021:  
Tren 2021 =  $\frac{87.892.163.416,35}{88.135.007.244,26} \times 100\% \approx 99.72\%$
9. Pertumbuhan Ekonomi 2022:  
Tren 2022 =  $\frac{125.386.713.912,32}{87.892.163.416,35} \times 100\% \approx 142.89\%$

Dari analisis tersebut, dapat dilihat pola tren dari Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara:

- a. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2014, 2015, dan 2016.
- b. Kemudian terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2017 dan 2018.
- c. Pada tahun-tahun berikutnya, terdapat fluktuasi tetapi cenderung stabil dengan pertumbuhan yang relatif kecil atau sedikit menurun.
- d. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan kembali.

Dengan demikian, analisis tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya fluktuasi tetapi juga adanya periode peningkatan yang signifikan. Hal ini penting untuk

dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Maka analisis trend pada laporan keuangan Daerah Periode 2013- 2022 memberikan kesimpulan bahwa analisis tren menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan namun juga adanya periode-periode perbaikan dan pertumbuhan yang positif. Hal ini menekankan pentingnya pemantauan yang cermat terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keadaan keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta pentingnya perencanaan keuangan dan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.

### **Evaluasi Hasil Laporan Data Keuangan Daerah**

Evaluasi dari hasil laporan data keuangan daerah yang telah diuraikan dapat dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

#### **1. Fluktuasi Pendapatan DBH (Dana Bagi Hasil)**

- a. Positif : Tren menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan, namun terdapat periode-periode perbaikan dan pertumbuhan yang positif, terutama pada tahun 2019 dan 2022.
- b. Negatif : Fluktuasi yang signifikan dapat menjadi tantangan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan menuntut kewaspadaan dalam pengelolaan dana.

#### **2. Fluktuasi Pendapatan DAU (Dana Alokasi Umum)**

- a. Positif : Meskipun terdapat fluktuasi, tren umum DAU cenderung stabil dengan pertumbuhan yang relatif kecil atau sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Negatif : Penurunan signifikan pada tahun 2014-2015 menunjukkan potensi risiko terhadap ketersediaan dana untuk belanja operasional dan pembangunan.

#### **3. Kemandirian Keuangan Daerah**

- a. Positif : Terjadi fluktuasi signifikan, namun tren pertumbuhan positif kembali terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2022 setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya.
- b. Negatif : Fluktuasi yang besar menunjukkan pentingnya strategi keuangan yang adaptif untuk mengelola pendapatan daerah dengan efisien.

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

- a. Positif : Terjadi peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun tertentu, menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat.
- b. Negatif : Fluktuasi yang signifikan dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah, terutama dalam hal pendapatan dan belanja.

Dari evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan daerah menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan adanya fluktuasi yang signifikan namun juga adanya periode-periode perbaikan dan pertumbuhan positif. Hal ini menekankan pentingnya pemantauan yang cermat terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keadaan keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perencanaan keuangan yang adaptif, efisien, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas keuangan daerah di masa depan. Selain itu, strategi diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan PAD yang efektif, serta kebijakan fiskal yang bijaksana juga perlu dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

### **Analisis Deskriptif**

#### **Data Keuangan Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)**

Data laporan data keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara periode

2013-2022 yang dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1** Data Keuangan Daerah DBH

| Tahun | Dana Bagi Hasil (DBH) |
|-------|-----------------------|
| 2013  | 870.544.568.872,00    |
| 2014  | 872.534.744.365,00    |
| 2015  | 770.198.320.794,00    |
| 2016  | 621.009.595.540,00    |
| 2017  | 364.483.687.872,00    |
| 2018  | 569.159.832.744,00    |
| 2019  | 865.335.922.349,00    |
| 2020  | 570.118.399.732,00    |
| 2021  | 435.298.726.306,00    |
| 2022  | 1.423.537.159.378,00  |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan tabel dan bagan 4.1 dari data keuangan daerah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, tahun 2013-2022 yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), dapat diinterpretasikan Tren Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Terjadi fluktuasi yang cukup signifikan dalam penerimaan DBH dari tahun ke tahun. Pada awal periode (2013-2014), terlihat sedikit peningkatan yang stabil dalam penerimaan DBH. Pada tahun 2015, terjadi penurunan yang cukup besar dalam penerimaan DBH, yang kemudian berlanjut hingga tahun 2017. Tahun 2018 mencatat kembali peningkatan, namun masih di bawah level tahun 2014. Tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam penerimaan DBH, mencapai level yang hampir sama dengan tahun 2014 dan terjadi fluktuasi yang cukup besar pada tahun-tahun berikutnya, dengan lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2022.

Sebagai pengaruh fluktuasi terhadap kesehatan keuangan daerah yaitu, fluktuasi dalam penerimaan DBH Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat berdampak langsung pada kesehatan keuangan daerah. Penurunan tajam dapat mengganggu ketersediaan dana untuk program-program pembangunan dan layanan publik. Kenaikan yang signifikan, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan 2022, dapat memberikan dorongan keuangan yang kuat bagi daerah, namun juga perlu dikelola dengan bijak untuk menghindari risiko dependensi yang berlebihan terhadap sumber pendapatan eksternal.

Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memiliki strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan berkelanjutan. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan pembangunan kemandirian keuangan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi yang cerdas. Pentingnya mempertimbangkan ketahanan keuangan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi dana bagi hasil.

Analisis data keuangan ini juga memberikan dasar bagi perencanaan jangka panjang Kabupaten Penajam Paser Utara. Proyeksi ke depan harus mempertimbangkan pola fluktuasi dalam penerimaan DBH dan mengembangkan strategi keuangan yang berkelanjutan.

## Data Keuangan Daerah DAU

**Tabel 2** Data Keuangan Daerah DAU

| Tahun | Dana Alokasi Umum (DAU) |
|-------|-------------------------|
| 2013  | 194.579.185.000,00      |
| 2014  | 188.713.598.000,00      |
| 2015  | 138.285.466.000,00      |

|      |                    |
|------|--------------------|
| 2016 | 254.752.550.000,00 |
| 2017 | 255.066.428.000,00 |
| 2018 | 259.192.257.000,00 |
| 2019 | 283.885.908.000,00 |
| 2020 | 275.868.751.000,00 |
| 2021 | 271.407.999.000,00 |
| 2022 | 272.437.796.000,00 |

Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2013 hingga 2022, terlihat Tren Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), terjadi variasi yang signifikan dalam penerimaan DAU dari tahun ke tahun. Pada awal periode (2013- 2015), terlihat penurunan yang cukup besar dalam penerimaan DAU. Pada tahun 2016, terjadi lonjakan yang signifikan dalam penerimaan DAU, yang kemudian cenderung stabil pada level yang lebih tinggi. Meskipun ada fluktuasi kecil, namun secara keseluruhan, penerimaan DAU cenderung stabil dari tahun 2016 hingga 2022.

Sebagai Pengaruh Penerimaan DAU terhadap Kesehatan Keuangan Daerah, Penerimaan DAU merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Lonjakan atau penurunan yang signifikan dalam penerimaan DAU dapat mempengaruhi kesehatan keuangan daerah, terutama dalam hal kecukupan dana untuk belanja operasional dan belanja pembangunan.

Fluktuasi dalam penerimaan DAU dapat disebabkan oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat, seperti perubahan dalam alokasi anggaran untuk daerah atau perubahan formula penghitungan DAU. Selain itu, kondisi ekonomi nasional juga dapat memengaruhi besaran DAU yang diterima oleh daerah.

Pertimbangan strategis Kabupaten Penajam Paser Utara perlu memperhatikan fluktuasi dalam penerimaan DAU dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Diperlukan strategi keuangan yang adaptif untuk mengelola keuangan daerah dengan efisien, termasuk pengelolaan belanja yang bijaksana dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sumber pendapatan lainnya. Dengan memahami tren dan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan DAU, Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola keuangan daerah, memaksimalkan penggunaan dana yang diterima, dan membangun keberlanjutan keuangan yang lebih kuat.

## Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 3** Kemandirian Keuangan Daerah

| Tahun | Kemandirian Keuangan Daerah |
|-------|-----------------------------|
| 2013  | 3.104.788.785,95            |
| 2014  | 2.927.826.891,35            |
| 2015  | 2.854.377.002,28            |
| 2016  | 7.708.979.248,60            |
| 2017  | 7.005.271.711,50            |
| 2018  | 4.907.846.756,75            |
| 2019  | 9.150.885.925,25            |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2020 | 10.617.471.344,25 |
| 2021 | 6.726.318.073,00  |
| 2022 | 8.306.854.374,00  |

Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2013 hingga 2022, Tren Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa mandiri suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri (Pendapatan Asli Daerah/PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami fluktuasi selama periode tersebut.

Fluktuasi Kemandirian Keuangan Pada tahun 2013, kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 3.104.788.785,95. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, terjadi fluktuasi naik turun yang signifikan. Peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016, di mana kemandirian keuangan hampir tiga kali lipat, namun, setelah tahun 2016, terjadi penurunan dan fluktuasi yang cukup besar hingga tahun 2021. Pada tahun 2020, terjadi lonjakan kemandirian keuangan sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi kemandirian keuangan, yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan dalam komposisi pendapatan daerah, perubahan kebijakan pajak, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasional.

Dampak terhadap kesehatan keuangan daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah sangat penting dalam menilai keberlanjutan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin mandiri dan stabil keuangan daerah dalam jangka panjang.

Analisis fluktuasi kemandirian keuangan ini dapat menjadi dasar untuk perencanaan keuangan daerah di masa depan. Perlu dipertimbangkan strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan yang berkelanjutan, seperti diversifikasi sumber pendapatan, pengelolaan PAD yang efektif, dan kebijakan fiskal yang bijaksana. Dengan memahami fluktuasi dan tren kemandirian keuangan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam perencanaan keuangan untuk mendukung keberlanjutan dan stabilitas keuangan daerah tersebut.

## Pertumbuhan Ekonomi

**Tabel 4** Pertumbuhan Ekonomi

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|-------|---------------------|
| 2013  | 51.204.182.224,70   |
| 2014  | 57.919.614.222,27   |
| 2015  | 65.567.382.369,11   |
| 2016  | 224.652.811.860,67  |
| 2017  | 103.574.866.662,84  |
| 2018  | 70.390.460.397,48   |
| 2019  | 93.491.428.426,19   |
| 2020  | 88.135.007.244,26   |
| 2021  | 87.892.163.416,35   |
| 2022  | 125.386.713.912,32  |

Sumber: Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, 2023

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dari

tahun 2013 hingga 2022, Mari kita interpretasikan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2013 hingga 2022, tren pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menggambarkan perubahan nilai ekonomi (GDP atau produk domestik regional bruto) dari tahun ke tahun. Dari data yang diberikan, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalami fluktuasi selama periode tersebut.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dengan kenaikan yang relatif kecil. Namun, terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun 2016, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti investasi besar, proyek-proyek pembangunan, atau peningkatan aktivitas ekonomi tertentu. Setelah tahun 2016, terjadi fluktuasi yang lebih besar dengan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi kembali setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti investasi, sektor ekonomi yang berkembang, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, dan faktor-faktor eksternal lainnya.

Dampak terhadap kesehatan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif secara umum mencerminkan kesehatan ekonomi daerah. Namun, fluktuasi yang besar dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah, terutama dalam hal pendapatan dan belanja.

Analisis fluktuasi pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa depan. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang fluktuasi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, pihak terkait dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah untuk masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

### 1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah mekanisme pemberian sebagian pendapatan kepada daerah-daerah di Indonesia, yang diambil dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat. Sistem ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat otonomi daerah dan memperbaiki kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan pembahasan Dana Bagi Hasil:

- a. Tujuan : DBH dirancang untuk memperkuat stabilitas keuangan lokal, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi regional, dan mengurangi kesenjangan pembangunan serta tingkat kesejahteraan antar wilayah.
- b. Sumber Pendapatan : Pendapatan bagi hasil berasal dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pendapatan dari sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi.
- c. Perhitungan : Pemerintah menetapkan rumus dan kriteria spesifik untuk membagi Dana Bagi Hasil (DBH), yang umumnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi ekonomi daerah terhadap pendapatan nasional, taraf kesejahteraan masyarakat setempat, dan kapasitas keuangan daerah.
- d. Kritik dan Tantangan : Walaupun DBH dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang kurang berkembang, ada kritik terhadap cara pembagiannya. Beberapa kritik mencakup ketidakjelasan dalam penghitungan

dan penugasan, kurangnya kejelasan, dan potensi penyalahgunaan oleh pemerintah pusat dalam menentukan pembagian dana.

- e. Reformasi dan Perubahan : Seiring dengan evolusi situasi ekonomi dan politik di Indonesia, sistem Dana Bagi Hasil (DBH) telah mengalami beragam reformasi dan modifikasi seiring berjalannya waktu. Ini mencakup penyesuaian formula perhitungan, peningkatan dalam transparansi, dan penguatan mekanisme pengawasan.
- f. Dampak : DBH memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, memungkinkan daerah untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan mengenai Dana Bagi Hasil menjadi penting karena hal ini berkaitan erat dengan pembangunan dan pemerataan ekonomi di Indonesia, serta dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, perdebatan dan kajian terus berlanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pembagian DBH.

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu mekanisme pendanaan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah di Indonesia. Pendanaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik, serta menjalankan program pembangunan di tingkat lokal.

Berikut adalah beberapa poin pembahasan mengenai Dana Alokasi Umum (DAU):

- a. Tujuan dan Fungsi: Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal serta memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia.
- b. Sumber Pendanaan: Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari pendapatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat membagi sebagian pendapatan negara kepada pemerintah daerah melalui sistem DAU.
- c. Perhitungan dan Penyaluran: Pemerintah daerah menerima alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan suatu rumus yang memperhitungkan berbagai variabel, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor-faktor kebutuhan dasar lainnya. Dana ini disalurkan secara rutin setiap tahun untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah.
- d. Penggunaan Dana: Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Biasanya, dana ini digunakan untuk mendukung sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan dasar lainnya. Tanggung jawab pemerintah daerah adalah mengelola DAU secara efisien dan efektif, sesuai dengan prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
- e. Evaluasi dan Pertanggungjawaban: Pemerintah pusat sedang mengevaluasi cara pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memastikan kepatuhan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga harus menyampaikan laporan tentang bagaimana DAU tersebut digunakan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- f. Revisi dan Penyesuaian: Formula penghitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat disesuaikan secara berkala guna mengantisipasi perubahan dalam dinamika ekonomi, sosial, dan demografi baik di level lokal maupun nasional. Penyesuaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa alokasi dana yang

diberikan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pemerintah daerah.

DAU menjadi alat krusial dalam usaha pemerataan pembangunan dan memberdayakan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan keberadaan DAU, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih swadaya dalam mendanai sejumlah program pembangunan yang menjadi kewajibannya.

### 3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian finansial daerah mengacu pada kapasitas pemerintah daerah untuk mengurus penerimaan dan pengeluarannya sendiri tanpa bergantung terlalu banyak pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber dana eksternal lainnya. Diskusi tentang kemandirian finansial daerah melibatkan beberapa faktor utama:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Salah satu tanda penting dari kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencukupi. PAD ini bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah (misalnya pajak hotel, restoran, dan kendaraan bermotor), retribusi daerah (contohnya retribusi jasa usaha dan pelayanan pasar), pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan sumber pendapatan lainnya.
- b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat: Walaupun tingkat kemandirian finansial daerah diukur dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh, pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat juga merupakan sumber pendapatan penting. Karenanya, tingkat kemandirian keuangan daerah juga tercermin dari seberapa besar ketergantungan mereka pada transferan dari pemerintah pusat.
- c. Efisiensi Pengelolaan Keuangan: Kemandirian finansial daerah dapat dilihat dari seberapa efisien pemerintah daerah mengelola keuangannya. Hal ini mencakup manajemen yang baik terhadap pemasukan dan pengeluaran, pengawasan terhadap anggaran, kontrol pengeluaran, dan upaya untuk mengurangi pemborosan dan korupsi.
- d. Diversifikasi Pendapatan: Untuk meningkatkan kemandirian finansial, pemerintah daerah harus melakukan diversifikasi pendapatan, yang berarti tidak hanya bergantung pada satu atau dua sumber pendapatan utama. Dengan cara ini, ketika salah satu sumber pendapatan mengalami penurunan, pemerintah daerah masih memiliki sumber pendapatan lain yang dapat menyeimbangkan situasi tersebut.
- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan otonomi keuangan daerah juga memerlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama di sektor keuangan dan manajemen. Administrasi daerah harus dilengkapi dengan personel yang terampil dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi keuangan daerah secara efektif.
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Salah satu metode untuk meningkatkan kemandirian finansial wilayah adalah dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari wilayah itu sendiri. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi, meningkatkan efisiensi dalam mengelola aset wilayah, dan juga menggali potensi ekonomi lokal yang ada.
- g. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Penguatan keuangan daerah juga bisa dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memajukan berbagai sektor ekonomi lokal, pemerintah daerah dapat menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan warga, dan akhirnya meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Perhatian pada aspek-aspek yang telah disebutkan adalah kunci dalam menjelajahi pembahasan tentang kemandirian keuangan daerah. Diperlukan perumusan strategi yang cermat untuk memajukan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan. Langkah ini memiliki signifikansi yang besar dalam upaya

menciptakan stabilitas finansial yang kokoh dan memperkuat prinsip otonomi daerah.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Analisis mengenai pertumbuhan ekonomi melibatkan evaluasi berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut, konsekuensinya terhadap masyarakat, dan upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa aspek krusial yang dibahas dalam konteks pertumbuhan ekonomi meliputi:

**Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi:** Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi investasi, pengeluaran konsumen, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, stabilitas politik, situasi pasar global, kekayaan alam, serta faktor demografis seperti jumlah penduduk dan angkatan kerja.

**Indikator Pertumbuhan Ekonomi:** Untuk menilai perkembangan ekonomi, diperlukan penanda-penanda seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan pendapatan per individu, investasi, serta faktor-faktor lain yang mencerminkan kegiatan ekonomi suatu negara.

**Dampak Pertumbuhan Ekonomi:** Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi yang kuat meliputi peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan standar hidup, investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, serta kemajuan dalam inovasi teknologi. Namun, ketidakseimbangan atau ketidakberlanjutan pertumbuhan ekonomi juga bisa berdampak negatif, seperti meningkatnya kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, degradasi lingkungan, dan potensi krisis ekonomi.

**Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Pemerintah memegang peranan vital dalam memacu perkembangan ekonomi dengan menggunakan kebijakan fiskal dan moneter, mengatur pasar, menginvestasikan dalam sektor pendidikan dan infrastruktur, mendorong inovasi dan teknologi, serta memajukan industri dan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar.

**Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan:** Sekarang, ada peningkatan minat yang signifikan terhadap gagasan tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, lingkungan, serta keberlanjutan. Ini menuntut keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, pemerataan sosial, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah subjek yang rumit dan melibatkan berbagai bidang studi seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan lingkungan. Pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi sering kali melibatkan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan ekonomi suatu negara atau area tertentu.

#### SIMPULAN

Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan DBH menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan tetapi juga perbaikan yang cukup besar pada tahun-tahun tertentu.

Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan adanya fluktuasi tetapi juga adanya periode peningkatan yang signifikan.

Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan perubahan signifikan dalam kemandirian keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan.

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya fluktuasi tetapi juga adanya periode peningkatan yang signifikan. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## REFERENSI

- 1 Alfarisi, salman. 2009. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- 2 Antonius, 2002. Pengaruh Kemandirian Terhadap Interaksi Sosial Pada Remaja. Skripsi. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- 3 Arini, Prima A. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta Vol.2 No.2 November 2016*.
- 4 Ariyani, 2009. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Universitas Negeri Medan.
- 5 Badan Pusat Statistik. PPU dalam Angka. Berbagai Edisi tahun 2023. Departemen dalam Negeri. 2004. Undang-undang Otonomi Daerah. Jakarta: Tamita Utama.
- 6 Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonomi Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- 7 Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat Jakarta
- 8 Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- 9 Hamja, Yahya. 2012. *Materi Kuliah Ekonometrik*. Jakarta: UIN Jakarta.
- 10 Hendaris, Budi R. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi Bandung*.
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- 13 Rahmah dan Basri Zein. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. (Vol. 1 No. 1).